

# Konstruksi Kebenaran dalam *Evidence-Based Policy Making*: Analisis Wacana Kritis atas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten

*Construction of truth in evidence-based policy making: Critical discourse analysis of poverty reduction policies in Banten province*

**Eko Supriatno\*, Fahd Pahdepie, Rahmat Salam, Andriansyah**

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

\* [eko.supriatno@student.umj.ac.id](mailto:eko.supriatno@student.umj.ac.id) (Primary Contact)

---

## ABSTRACT

### Keywords

Evidence-Based Policy Making; Truth Construction; Critical Discourse Analysis; Philosophy of Science; Poverty Alleviation Policy

### Article History

Received: 2026-01-15  
Accepted: 2026-02-12

Evidence-Based Policy Making (EBPM) is often presented as a rational and objective policy ideal, yet evidence is not neutral; it is constructed through power relations, interests, and epistemic frameworks. Using Critical Discourse Analysis grounded in social constructivism and Michel Foucault's theory of power, this study examines poverty alleviation policy in Provinsi Banten. The analysis draws on provincial planning documents (RPJMD/RPD and RKPD), Bappeda Provinsi Banten policy documents, and BPS poverty releases and press statements. Findings identify a recurring EBPM discourse that privileges macro indicators and performance metrics to narrate "progress," while marginalizing intra-provincial inequality and contested definitions of "the poor." Evidence therefore does not "speak for itself" but is mediated by values, policy paradigms, and dominant actors' interests. The article argues for EBPM that integrates ethical and epistemological reflexivity and local context so policy is not only scientific but also fair and inclusive.

---

Copyright © 2026, Supriatno et al.  
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru  
DOI: [10.56113/takuana.v4i4.346](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.346)

---

## 1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, berkembang gerakan global untuk memisahkan ideologi dan kepentingan politik dari proses kebijakan melalui pendekatan *evidence-based policy making* (EBPM) (Parkhurst, 2017). Di Indonesia, penguatan EBPM ditandai dengan peran lembaga riset negara seperti BRIN yang menstandarisasi ilmu pengetahuan sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional (Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN)). Namun demikian, realitas kebijakan publik menunjukkan bahwa keputusan sering kali merupakan hasil pilihan subjektif para aktor kebijakan yang dipengaruhi kepentingan politik serta konstruksi pengetahuan yang tidak sepenuhnya netral (Cairney, 2016).

Di Provinsi Banten, narasi EBPM digunakan secara luas dalam penetapan arah pembangunan, termasuk dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai kebijakan strategis daerah (Bappeda Provinsi Banten, 2022). Klaim bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya berbasis data saintifik (meliputi aspek sosial, ekonomi, dan demografi) perlu dikaji secara kritis (Smith & Stewart, 2020). Sejalan dengan gagasan Michel Foucault mengenai relasi *power-knowledge*, bukti tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi yang membentuk definisi realitas kebijakan (Foucault, 1980). Dengan demikian, EBPM tidak sekadar mekanisme teknokratik, tetapi merupakan arena di mana kekuasaan bekerja melalui konstruksi pengetahuan (Saltelli & Giampietro, 2017).

Artikel ini bertujuan mengeksplorasi konstruksi kebenaran dalam EBPM di Banten, dengan menyoroti kesenjangan antara efektivitas teknis dan realitas epistemologis dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan (BPS Provinsi Banten, 2023). Pertanyaan utama penelitian ini adalah: Bagaimana wacana EBPM membentuk konstruksi kebenaran dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Banten, dan apa implikasinya terhadap keadilan sosial serta legitimasi kebijakan publik? (Bacchi & Goodwin, 2016).

Dalam konteks kebijakan publik, EBPM dipahami sebagai pendekatan rasional yang menekankan pengambilan keputusan berbasis data riset yang sistematis dan terukur (Oliver, 2014). Namun, dari perspektif filsafat ilmu, pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai wacana pembentuk kebenaran kebijakan (Strassheim, 2017). EBPM dapat menjadi ruang di mana dinamika kekuasaan bekerja melalui konstruksi pengetahuan sehingga bukti tidak pernah benar-benar berdiri netral, tetapi selalu berada dalam relasi kuasa, kepentingan, dan kerangka epistemik tertentu (Koopman, 2013).

Berbagai kajian menunjukkan bahwa data dapat dikonstruksi untuk mendukung kepentingan tertentu dalam proses kebijakan publik, termasuk dalam isu kemiskinan dan pembangunan daerah (Safitri, et al., 2022). Dengan demikian, klaim objektivitas EBPM perlu dikritisi karena bukti tidak pernah berdiri sendiri; ia dibentuk oleh struktur pengetahuan, dinamika kekuasaan, dan kepentingan politik yang bekerja dalam proses kebijakan (Marston & Watts, 2003).

Artikel ini menggunakan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis/CDA*) dengan pendekatan konstruktivisme sosial dan teori Foucault sebagai kerangka untuk memetakan bagaimana narasi bukti diproduksi, dinegosiasikan, dan digunakan dalam mendefinisikan realitas kebijakan penanggulangan kemiskinan di Banten (Fairclough, 2015). Fokus analisis tidak hanya pada dimensi teknis penggunaan data, tetapi juga pada tiga dimensi utama: epistemologis (legitimasi pengetahuan), ontologis (pendefinisian realitas kebijakan), dan praksis (implikasi implementasi kebijakan dalam realitas sosial) (Fischer, 2019).

Artikel ini menawarkan novelty melalui tiga kontribusi utama. Pertama, menunjukkan bahwa sebagian besar kajian EBPM masih berfokus pada efektivitas teknis, validitas data, dan capaian program, tetapi mengabaikan dimensi politik-epistemologis dalam pembentukan kebenaran kebijakan (Newman, 2017). Kedua, mengisi kekosongan kajian yang mengaitkan dinamika kekuasaan dalam EBPM dengan konteks lokal Indonesia, khususnya Provinsi Banten yang memiliki karakter kebijakan strategis dan kompleksitas sosia (Yuningsih & Komala, 2021).l. Ketiga, menghadirkan pendekatan filsafat ilmu untuk

memahami EBPM sebagai praktik yang tidak hanya ilmiah tetapi juga politis, sehingga membuka ruang evaluasi yang lebih kritis dan reflektif (French, 2019).

Dengan mengintegrasikan kerangka teori global (konstruktivisme sosial, *power-knowledge* Foucault, dan CDA) dengan konteks lokal Banten, artikel ini menegaskan bahwa EBPM bukan sekadar praktik teknokratik, tetapi juga praktik politik yang membentuk kebenaran kebijakan. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian administrasi publik serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ilmiah, adil, inklusif, akuntabel, serta responsif terhadap realitas sosial lokal.



**Gambar 1:** Dekonstruksi Relasi Kuasa-Pengetahuan (*Power-Knowledge*) dalam EBPM

Keterangan: Diagram ini mengilustrasikan siklus pembentukan "Rezim Kebenaran Kebijakan", di mana kekuasaan menentukan agenda riset yang kemudian memproduksi bukti untuk melegitimasi pengetahuan dan otoritas kebijakan. Visualisasi pada Gambar 1 mempertegas bahwa dalam administrasi publik, "bukti" tidak jatuh dari ruang hampa (Cairney, 2016). Proses ini merupakan siklus di mana lembaga otoritas menggunakan kekuasaannya untuk menentukan agenda dan metode, yang kemudian memproduksi bukti-bukti "ilmiah" guna melegitimasi narasi kebijakan tertentu (Newman, 2017). Hal ini membentuk apa yang disebut sebagai Rezim Kebenaran, di mana kebenaran kebijakan adalah kebenaran yang telah disahkan oleh pemegang otoritas melalui kerangka saintifik yang telah dikonstruksi. Literatur internasional tentang EBPM menunjukkan bahwa praktik kebijakan berbasis bukti sering kali menghadapi persoalan selektivitas bukti, politisasi data, dan bias kebijakan yang disamarkan melalui klaim saintifik (Oliver, 2014; Parkhurst, 2017).

Pemerintah atau aktor kebijakan dapat memilih data tertentu, menonjolkan indikator yang menguntungkan, serta mengabaikan bukti yang bertentangan (French, 2019). Situasi ini menjadikan EBPM bukan hanya arena teknokratik, tetapi juga arena politik wacana (*discursive politics*) di mana bukti dinegosiasikan, diproduksi, dan disebarkan untuk membangun legitimasi (Marston & Watts, 2003). Dalam konteks Indonesia, penguatan EBPM secara kelembagaan terlihat melalui peran Bappenas, BRIN, dan lembaga statistik negara dalam menstandarisasi data (BRIN, 2023), indikator pembangunan, dan basis

pengambilan kebijakan nasional. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa praktik EBPM sering berhadapan dengan dinamika kekuasaan, kepentingan politik, dan kompleksitas birokrasi (Bappenas, 2020; BRIN, 2023). Dalam isu kemiskinan, data statistik resmi sering dijadikan dasar utama perumusan kebijakan, tetapi pada saat yang sama mengabaikan dimensi sosial, struktural, dan pengalaman harian masyarakat miskin yang tidak selalu terwakili dalam angka-angka.

Kajian tentang penanggulangan kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa indikator kemiskinan yang digunakan pemerintah kerap didominasi pendekatan kuantitatif dan ekonomi, sehingga membentuk definisi kemiskinan yang teknokratik dan sempit. Hal ini sejalan dengan temuan Gabby (2013) serta Lentari (2024a) yang menegaskan bahwa EBPM dalam praktiknya sering kali menjadi arena kontestasi antara rasionalitas teknokratik dan kepentingan politik. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi objek konstruksi pengetahuan yang sarat wacana (Yuningsih & Komala, 2021).

Berdasarkan kerangka tersebut, studi ini memosisikan EBPM bukan semata-mata sebagai pendekatan teknis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi sebagai praktik politik-epistemologis yang melibatkan konstruksi kebenaran, legitimasi kekuasaan, dan praktik wacana. Dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis (CDA) dan teori *power/knowledge* Foucault, penelitian ini menganalisis bagaimana bukti tentang kemiskinan di Provinsi Banten diproduksi, dipresentasikan, dan digunakan untuk membentuk narasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Fokus analisis tidak hanya pada akurasi teknis data, tetapi juga pada bagaimana data tersebut bekerja sebagai instrumen legitimasi, pengendalian makna, dan pembingkaihan realitas sosial. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian yang selama ini cenderung menempatkan EBPM hanya dalam kerangka teknokratik. Artikel ini berkontribusi secara teoretis dengan memperkuat pemahaman mengenai EBPM sebagai praktik politik-pengetahuan serta secara praktis memberikan refleksi kritis bagi pemerintah daerah agar kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ilmiah dan efektif, tetapi juga adil, inklusif, dan sensitif terhadap realitas sosial masyarakat yang menjadi subjek kebijakan.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis (*critical discourse analysis/CDA*) untuk mengkaji bagaimana konsep bukti dikonstruksi, dimaknai, dan dimanfaatkan dalam praktik *evidence-based policy making* (EBPM) di Indonesia, khususnya dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan (Fairclough, 2024). Kerangka CDA merujuk pada pendekatan Norman Fairclough dengan tiga level analisis: teks (pilihan bahasa, struktur narasi, dan representasi kebijakan), praktik diskursif (produksi-distribusi-konsumsi teks serta intertekstualitas), dan praktik sosial (relasi wacana dengan kekuasaan, ideologi, dan struktur sosial) (Janks, 2022).

Pendekatan ini dipilih karena sejalan dengan kritik filsafat ilmu dan politik pengetahuan yang menempatkan *evidence* sebagai konstruksi sosial dalam relasi kuasa (Foucault, 1972; 1980; Berger & Luckmann, 1966; Kuhn, 1970; Popper, 1959; Gadamer, 1975 dalam Widiatmaka, 2023), sehingga memungkinkan pembacaan yang lebih komprehensif atas konstruksi kebenaran kebijakan dalam EBPM (Nugroho, 2021). Selain

itu, pendekatan ini juga selaras dengan kerangka filsafat ilmu dan politik pengetahuan yang menegaskan bahwa bukti tidak pernah netral, melainkan merupakan konstruksi sosial yang terkait dengan relasi kuasa sebagaimana ditegaskan dalam pemikiran Foucault (1972; 1980), Berger dan Luckmann (1966), Kuhn (1970), Popper (1959), dan Gadamer (1975) dalam (Widiatmaka, 2023). Dengan demikian, metode ini memberikan landasan yang kuat untuk menghasilkan analisis yang komprehensif terhadap konstruksi kebenaran kebijakan dalam kerangka EBPM (Nugroho, 2021).

Unit analisis penelitian ini adalah teks kebijakan dan teks pendukung yang memuat klaim “berbasis bukti/data” dalam penanggulangan kemiskinan, termasuk definisi masalah, indikator, aktor, dan narasi keberhasilan. Data sepenuhnya berasal dari literatur sekunder yang disusun sebagai korpus (cantumkan jumlah dokumen dan rentang tahun), meliputi audit kebijakan BPJS (Gabby, 2013), kebijakan kemiskinan tingkat daerah (Lentari, 2024), Prosiding Seminar Nasional DPR RI tentang EBPM (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020), serta prosiding Konferensi Nasional Universitas Islam Malang 2020 (Head, 2022). Teks dikumpulkan melalui penelusuran dokumen secara sistematis dan dicatat dalam inventaris (judul, tahun, institusi, jenis dokumen, serta bagian yang memuat klaim *evidence*)

Tahap Analisis CDA. Analisis dilakukan melalui (1) pembacaan awal dan segmentasi kutipan kunci, (2) coding tematik untuk membentuk kategori/pola wacana, (3) analisis level teks (modalitas klaim, nominalisasi, struktur *problem-solution*, representasi aktor), (4) analisis praktik diskursif (intertekstualitas/interdiskursivitas dan rantai legitimasi *evidence*), dan (5) analisis praktik sosial (keterkaitan wacana dengan relasi kuasa dan efek eksklusif). Keandalan dijaga dengan audit trail (kutipan teridentifikasi), triangulasi antarjenis dokumen Penggunaan berbagai sumber ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa analisis tidak bertumpu pada satu konteks kebijakan saja, melainkan merepresentasikan variasi praktik EBPM dalam kebijakan publik Indonesia, terutama yang relevan dengan penanggulangan kemiskinan (Parkhurst, 2017).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. “Kebenaran” dalam *evidence-based policy making* (EBPM) dibentuk melalui relasi pengetahuan, kekuasaan, dan praktik kebijakan

Pembahasan ini mengkaji bagaimana “kebenaran” dalam EBPM dibentuk melalui relasi pengetahuan, kekuasaan, dan praktik kebijakan (Head, 2022). Melalui CDA, terlihat bahwa bukti dalam EBPM bukan entitas yang netral, melainkan hasil konstruksi diskursif yang dipengaruhi oleh aktor, kepentingan, dan konteks sosial-politik (Fairclough, 2024). Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa EBPM tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen teknokratik, tetapi sebagai arena epistemologis dan politis di mana *power-knowledge* bekerja membentuk kebenaran kebijakan publik (Head, 2022). Data menunjukkan peningkatan bertahap IPM dari sekitar 74,41 (2020) hingga 76,35 (2024), dengan pertumbuhan rata-rata 0,61-0,77%. Namun, narasi “kemajuan” ini sering menyembunyikan ketimpangan antarwilayah (Bappeda Provinsi Banten, 2024).

Dari perspektif filsafat ilmu, kondisi ini menunjukkan karakter konstruktivisme epistemologis, yakni kebenaran tidak inheren pada data, melainkan dibentuk oleh aktor dan struktur kekuasaan. Sejalan dengan pemikiran Michel Foucault, kondisi ini menggambarkan adanya *regime of truth* di mana kekuasaan menentukan apa yang dianggap valid sebagai pengetahuan kebijakan. Dengan demikian, EBPM bukan sekadar persoalan data, tetapi

persoalan siapa yang memiliki otoritas menafsirkan data tersebut serta bagaimana narasi kebenaran dibentuk dan dilegitimasi (Gabby, 2023).

Secara ontologis, EBPM cenderung menganggap realitas kebijakan dapat direduksi menjadi angka dan data kuantitatif (Lorenzini, 2023). Dalam program penanggulangan kemiskinan Jawa Timur, misalnya, bukti statistik menjadi dasar utama alokasi anggaran oleh pemerintah pusat. Namun Lentari (2024) menunjukkan bahwa pemerintah daerah memaknai realitas secara berbeda karena mempertimbangkan keterbatasan anggaran, kapasitas teknis, dan dinamika administratif (Fischer, 2019). Dengan demikian, terbentuk dua konstruksi realitas kemiskinan: bagi pemerintah pusat: *realitas statistik* dan bagi pemerintah daerah: *realitas praksis implementasi*.

### 3.2. Praktis EBPM: Implikasi Etis dan Keadilan Sosial

Pada tataran praksis, EBPM sering belum sepenuhnya menjawab dimensi etika dan keadilan sosial (Smith, 2021). Dalam konteks kemiskinan di Banten, pemujaan terhadap angka statistik sering kali melupakan wajah manusia di baliknya. Hal ini menciptakan jurang pemisah antara realitas administratif dan realitas empiris yang dialami masyarakat. data statistik kemiskinan di Banten (seperti IPM dan TPT) hanyalah puncak gunung es yang tampak di permukaan. Di bawah permukaan, terdapat realitas sosial yang jauh lebih besar (Nutley, 2023): ketidakadilan struktural, pengetahuan lokal masyarakat Banten, dan kepentingan aktor politik (Cairns, 2019).

Integrasi antara data kuantitatif BPS dengan metafora gunung es menyadarkan kita bahwa administrasi publik bukan sekadar manajemen angka. Jika seorang administrator publik hanya terpaku pada angka 5,63% kemiskinan tanpa memahami narasi kekuasaan di balik angka tersebut, maka ia sedang menjalankan 'teknokrasi buta' (French, 2019). Filsafat ilmu mengingatkan bahwa tugas kita adalah menyingkap bagian gunung es yang tenggelam tersebut agar kebijakan menjadi lebih manusiawi dan adil (Strassheim, 2020).

Rencana jurnal DAP menawarkan pendekatan penting dengan mengintegrasikan teori filsafat Barat seperti Foucault ke dalam konteks lokal Indonesia untuk mengidentifikasi kesenjangan epistemologis dalam praktik kebijakan. menegaskan pentingnya integrasi dimensi etika (termasuk pendekatan *deep ecology* dan *ethics of risk*) dalam sektor kesehatan dan kebencanaan. Dengan demikian, paradigma EBPM yang diperlukan bukan hanya rasional-teknokratis, tetapi juga: berbasis keadilan social, mengedepankan empati kebijakan, berpijak pada etika publik, sensitif terhadap realitas sosial (Nugroho, 2021).

### 3.3. Konstruksi Kebenaran Dalam EBPM

Dalam konteks filsafat ilmu, bukti dalam EBPM tidak pernah hadir sebagai realitas yang "berbicara sendiri". Data selalu membutuhkan proses interpretasi, penafsiran, dan pemaknaan sebelum diposisikan sebagai landasan kebijakan. Pada praktiknya, terdapat kecenderungan selektivitas bukti di mana data tertentu dipilih, diprioritaskan, atau bahkan dimanipulasi secara halus untuk mendukung agenda kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, bukti tidak dapat dipandang sebagai refleksi objektif atas realitas sosial, tetapi sebagai hasil konstruksi politik dan sosial yang diproduksi melalui relasi kekuasaan antar aktor kebijakan.

Meskipun EBPM dipandang sebagai pendekatan ideal dalam tata kelola pemerintahan modern, implementasinya tidak pernah sepenuhnya bebas dari persoalan. Selama lebih dari empat dekade diskursus kebijakan publik, hambatan implementasi selalu hadir dalam wajah yang relatif sama, mulai dari persoalan sinkronisasi kebijakan pusat–daerah, perbedaan interpretasi atas data, hingga keterbatasan regulasi dan tumpang tindih kewenangan birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh akurasi data, melainkan merupakan hasil negosiasi politik, kompromi administratif, serta interaksi antar-struktur kekuasaan.

Dalam konteks Indonesia, integrasi nasional menuntut kehadiran EBPM yang tidak hanya rasional secara teknokratis, tetapi juga adil, demokratis, dan berpihak pada kelompok rentan. EBPM yang terlalu teknokratis berpotensi bersifat anti-demokratis apabila mengabaikan partisipasi publik, menyingkirkan pengetahuan lokal, serta menempatkan kebijakan semata-mata sebagai instrumen administratif negara. Oleh karena itu, pendekatan penelitian partisipatif perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari praktik EBPM agar kebijakan tidak hanya ilmiah, tetapi juga inklusif dan responsif terhadap keragaman realitas sosial, termasuk dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di Provinsi Banten.

Pembahasan ini menegaskan bahwa EBPM tidak dapat ditempatkan sebagai domain netral ilmu pengetahuan. Ia merupakan arena politik-epistemologis di mana kekuasaan bekerja melalui konstruksi pengetahuan. Bukti dalam kebijakan publik tidak pernah berdiri sendiri; ia selalu diproduksi, dinegosiasikan, dan dilegitimasi dalam kerangka kepentingan tertentu. Karena itu, ontologi kebijakan publik harus dipahami sebagai ruang kontestasi makna, bukan sekadar ranah teknokratis yang steril dari politik. Apabila dimensi etika, keadilan sosial, dan partisipasi publik diabaikan, EBPM justru berpotensi memperkuat ketidakadilan struktural dan memperlebar jarak antara negara dan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan model EBPM yang berbasis keadilan sosial, inklusif, etis, partisipatif, dan sensitif terhadap konteks sosial-politik lokal. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten, pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas ilmiah kebijakan, tetapi sekaligus memperkuat legitimasi publik dan akuntabilitas demokratis negara.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *evidence-based policy making* (EBPM) di Provinsi Banten, khususnya dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan, tidak berjalan sebagai proses teknokratik yang netral, melainkan merupakan arena politik-epistemologis tempat kebenaran dikonstruksi melalui relasi *power-knowledge* sebagaimana dikemukakan oleh Michel Foucault (Foucault, 1980).

Bukti tidak pernah netral atau “berbicara sendiri”; bukti selalu dimediasi oleh paradigma dominan, kepentingan aktor, serta selektivitas interpretasi yang membentuk *regime of truth* tertentu. Melalui Analisis Wacana Kritis, penelitian ini menunjukkan bahwa narasi EBPM kerap menyembunyikan dinamika kekuasaan di balik klaim objektivitas ilmiah, sehingga berpotensi mempertahankan ketidakadilan struktural serta meminggirkan pengetahuan lokal dan pengalaman masyarakat rentan (Olsen, 2021). Temuan utama penelitian ini menegaskan tiga dimensi kritis. Pertama, Epistemologis: Bukti dikonstruksi oleh wacana dominan sehingga menyingkirkan perspektif alternatif (Parkhurst, 2017).

Kedua, Ontologis: Realitas kemiskinan direduksi menjadi sekadar data kuantitatif, sehingga kompleksitas sosial dan praksis kehidupan masyarakat tidak sepenuhnya terakomodasi. Dan ketiga, Praksis: Implementasi EBPM yang terlalu teknokratis berisiko memperlebar kesenjangan sosial apabila tidak mengintegrasikan etika publik dan prinsip keadilan.

Studi ini memberikan kontribusi teoretis penting dengan memperkaya diskursus administrasi publik melalui integrasi filsafat ilmu dan teori kekuasaan Foucault dalam analisis EBPM di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini menawarkan refleksi kritis bagi pembuat kebijakan untuk melampaui batas teknokratisme menuju tata kelola yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik dan kelompok rentan. EBPM tidak cukup hanya berbasis data, tetapi harus berbasis keadilan, kesadaran epistemik, dan keberpihakan etis terhadap masyarakat.

## BIOGRAFI PENULIS

**Eko Supriatno** adalah mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Email: [eko.supriatno@student.umj.ac.id](mailto:eko.supriatno@student.umj.ac.id)

**Fahd Pahdepie** adalah mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Email: [fahd.pahdepie@student.umj.ac.id](mailto:fahd.pahdepie@student.umj.ac.id)

**Rahmat Salam** adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang mengkhususkan diri dalam bidang Ilmu Administrasi Publik, dan filsafat ilmu.

Scopus ID: [57852602800](https://scopus.com/authorities/603zQ10AAAAJ)

Orchid ID: [0000-0002-5059-7787](https://orcid.org/0000-0002-5059-7787)

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=603zQ10AAAAJ>

Email: [rahmat.salam@umj.ac.id](mailto:rahmat.salam@umj.ac.id)

**Andriansyah** adalah Guru Besar dan Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik (DAP) di Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang mengkhususkan diri dalam bidang Ilmu Administrasi Publik.

Scopus ID: [57207806732](https://scopus.com/authorities/SUr_MEEAAAAJ)

Orchid ID: [0000-0002-1146-4826](https://orcid.org/0000-0002-1146-4826)

Google Scholar: [https://scholar.google.com/citations?user=SUr\\_MEEAAAAJ](https://scholar.google.com/citations?user=SUr_MEEAAAAJ)

Email: [andriansyah.andriansyah@umj.ac.id](mailto:andriansyah.andriansyah@umj.ac.id)

## DAFTAR PUSTAKA

- Bacchi, C., & Goodwin, S. (2016). *Poststructural policy analysis: A guide to practice*. Palgrave Macmillan.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. (2022). *Rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD) Provinsi Banten 2022–2026*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. (2024). *Laporan capaian indeks pembangunan manusia Banten 2020–2023*.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1991). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Penguin Books.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2023). *Profil kemiskinan di Provinsi Banten Maret 2023*. <https://banten.bps.go.id>
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023). *Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) BRIN 2022*.
- Cairney, P. (2016). The politics of evidence-based policy making. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Oxford University Press.
- Cairns, G. (2019). Evidence-based policy: A philosophical critique. *Journal of Evaluation in Clinical Practice*, 25(6), 1045–1051.
- Fairclough, N. (2015). *Language and power* (3rd ed.). Routledge.
- Fairclough, N. (2024). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (3rd ed.). Routledge.
- Fischer, F. (2019). *Knowledge politics and public policy in the post-truth era*. Palgrave Macmillan.
- Flyvbjerg, B. (2001). *Making social science matter: Why social inquiry fails and how it can succeed again*. Cambridge University Press.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977*. Pantheon Books.
- French, S. (2019). Evidence-based policy: A philosophical critique. *Journal of Evaluation in Clinical Practice*, 25(6), 1045–1051.
- Gabby, M. T. (2023). Audit kebijakan dan konstruksi bukti dalam layanan kesehatan. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(1), 1–15.
- Head, B. W. (2022). *Politics, policy and evidence*. Oxford University Press.
- Janks, H. (2022). Critical discourse analysis sebagai metodologi dalam penelitian kebijakan. *Jurnal Metodologi Pendidikan*, 5(2), 45–58.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Laporan evaluasi terpadu penanggulangan kemiskinan berbasis kearifan lokal*.

- Koopman, C. (2013). *Genealogy as critique: Foucault and the problems of modernity*. Indiana University Press.
- Kuhn, T. S. (2012). *The structure of scientific revolutions* (50th anniversary ed.). University of Chicago Press.
- Lentari, S. (2024a). Kontestasi rasionalitas dalam kebijakan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 27(1), 1–20.
- Lentari, S. (2024b). Paradoks kebijakan kemiskinan: Antara statistik dan realita daerah. *Jurnal Sosiologi*, 29(1), 1–18.
- Lorenzini, D. (2023). Foucault, regime of truth, and the history of the present. *Angelaki*, 28(1), 120–135.
- Marston, G., & Watts, R. (2003). Tampering with the evidence: A critical appraisal of evidence-based policy-making. *The Drawing Board: An Australian Review of Public Affairs*, 3(3), 143–163.
- Newman, J. (2017). The politics of evidence in public administration. *Public Administration Review*, 77(2), 211–218.
- Nugroho, A. (2021). Analisis wacana kritis pada dokumen kebijakan publik di Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 14(2), 1–15.
- Nutley, S. M. (2023). *Using evidence: What works?* Policy Press.
- Oliver, K., Lorenc, T., & Innvaer, S. (2014). The use of evidence in public policy: A review of reviews. *Evidence & Policy*, 10(1), 3–35.
- Olssen, M. (2021). Biopolitical power and evidence-based policy. *Educational Philosophy and Theory*, 53(12), 1173–1185.
- Parkhurst, J. (2017). *The politics of evidence: From evidence-based policy to the good governance of evidence*. Routledge.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. (2020). *Prosiding seminar nasional: Evidence-based policy making dalam fungsi legislasi*.
- Safitri, A., et al. (2022). Analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia: Tantangan dan harapan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 45–58.
- Salam, R., & Andriansyah. (2023). Kritis atas evidence-based policy: Menyingkap relasi kuasa dalam kebijakan. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 1–20.
- Saltelli, A., & Giampietro, M. (2017). What is wrong with evidence-based policy, and how can it be improved? *Futures*, 91, 62–71.
- Smith, K. E. (2021). Beyond evidence-based policy: The politics of ideas. *Policy & Politics*, 49(1), 3–22.

- Smith, K. E., & Stewart, E. (2020). We need to talk about politics: Addressing the neglect of politics in evidence-based policy. *Evidence & Policy*, 16(1), 109–127.
- Strassheim, H. (2017). Politics and policy expertise: Towards a political epistemology. *Evidence & Policy*, 13(4), 667–686.
- Strassheim, H. (2020). The rise of evidence-based policy and the role of expertise. In *Handbook of public policy*.
- Widiatmaka, P. (2023). Relasi kuasa-pengetahuan dalam kebijakan pendidikan: Perspektif Michel Foucault. *Jurnal Filsafat*, 33(1), 1–20.
- Yuningsih, N. Y., & Komala, R. (2021). Implementasi evidence-based policy making dalam pembangunan daerah di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 1–18.